Wali Kota Minta Ditunda, DPRD Menolak

Penerapan Pajak Hiburan

BATAM KOTA (BP) - Wali Kota Batam Muhammad Rudi meminta kenaikan pajak hiburan ditunda selama setahun. Bahkan Rudi sudah mengirim surat ke DPRD Batam. Hanya saja, Komisi II DPRD Batam menyatakan enggan menyetujui permintaan wali kota tersebut. Mereka beralasan harus ada dasar kuat.

"Mau naik, turun atau dihapuskan. Segala sesuatu harus punya dasar yang kuat," ucap Ketua Komisi II DPRD Batam Edward Brando, Selasa (24/4).

Menurutnya, Komisi II tidak bisa ikut menyetujui sesuatu usulan yang tidak mempunyai dasar yang jelas. Contohnya, kata Edward, ketika pelaku usaha hiburan berpendapat kenaikan pajak bakal menurunkan sektor pariwisata. Tentu tidak semudah itu, harus ada data dan perhitungannya. Apakah betul pariwisata menurun.

"Jadi semua itu ada ukuran. Berhubungan sampai saat ini kami belum mendapatkan jawaban konkrit dari Pemko," ucapnya.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga mengaku belum bisa memberikan padangan, jika belum ada dasar yang kuat dari Pemko Batam. "Artinya untuk sementara kami tegaskan, jika belum ada masukan yang konkrit, itu (penerapan pajak hiburan) harus berjalan karena diatur di perda (peraturan daerah)," tegas dia.

Edward juga mengakui dalam klausul sendiri apabila ada wajib pajak keberatan dengan besaran yang ditetapkan pemerintah, dia bisa mengajukan keberatan kepada Pemko. Persoalan sudah diterapkan atau tidak wali kota punya otoritas.

"Hanya saja ketika surat itu dilayangkan ke kami (DPRD), artinya Pemko melibatkan DPRD. Kami minta datanya mana, indikator yang mendasari. Sampai sekarang belum diberikan. Kami tak mau keputusan kami subjektif karena suka atau tidak suka. Keputusan ini harus mampu dipertanggung jawabkan. Termasuk juga kepada masyarakat Kota Batam," jelasnya.

Anggota Komisi II DPRD Batam Uba Ingan Sigalingging juga mempertanyakan apa indikator Pemko Batam untuk menunda kenaikan pajak hiburan tersebut. Apalagi penundaan yang disampaikan wali kota selama satu tahun dinilai membutuhkan dasar yang kuat, sebab sudah diatur di perda. "Kalau setahun sama saja dengan merevisi perda. *Gak* bisa seperti itu," kata Uba.**(rng)**

F. DALIL HARAHAP/BATAM POS

Muslim Bidin

Masih Pakai Sistem Rangking

Disdik Sosialisasi Penerimaan Siswa Baru 2018-2019

YULITAVIA, Sekupang

Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam mulai mensosialisasikan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2018-2019. Tahun ini, Disdik akan menerapkan sistem zonasi sesuai dengan Peraturan Kementerian dan Kebudayaan (Kemendikbud) Nomor 17 Tahun 2017.

"Kemarin sudah ada Camat Batuaji yang sudah *action* bersama kepala sekolah yang ada di zonasi tersebut. Kami sangat apresiasi," kata Kepala Disdik Batam Muslim Bidin, Selasa (24/4).

Pria yang pernah menjabat kepala SMKN 1 Batam ini meminta camat untuk turut berpartisipasi dalam menyukseskan penerimaan siswa baru itu yang rencananya dibuka akhir Juni mendatang.

"Karena sistemnya zonasi, keikutsertaan camat sangat dibutuhkan untuk menghindari keributan saat PPDB nanti," jelasnya.

Mengenai jarak rumah siswa dari sekolah, Muslim menyebutkan sesuai dengan Permendikbud terkait penerapan zonasi, domisili siswa maksimal lima kilometer dari sekolah. "Namun, itu harus diatur juga. Kalau lima kilometer Sekupang ke Batuaji sana juga sampai. Maka dari itu camat harus terlibat," beber pria 60 tahun ini.

Meskipun sistem zonasi, pria kelahiran Rempangcate ini menegaskan bahawa sistem rangking berdasarkan nilai tetap diterapkan. Sebab, jika jumlah calon siswa melebihi kuota yang disediakan sekolah, maka tetap diberlakukan sistem rangking.

Baca **MASIH**...Hal 13

Masih Pakai Sistem Rangking

Sambungan dari hal 9

"Selain jarak rumah, nilai juga menjadi pertimbangan," ungkapnya.

Satu hal lagi, lanjut Muslim, sistem pendaftaran tetap dibuka secara *online*. Pihaknya tengah menyiapkan aplikasi yang bisa mendukung terlaksananya PPDB. "Tahun lalu sudah kami coba. Meskipun tetap ada orangtua yang kurang percaya dan memilih datang ke sekolah sejak pagi," tambahnya.

Menurutnya, karena banyaknya informasi yang harus disampaikan, maka peran camat, lurah hingga perangkat RT/RW sangat diharapkan. "Siswa yang daftar harus melampirkan surat domisili sebagai dokumen pendukung saat PPDB nanti," lanjut pria yang mengepalai Disdik Batam selama 10 tahun belakangan ini.

Sementara itu, Kepala SMP Negeri 3 Batam Wiwik Darwiyati mengatakan belum ada pertemuan dengan camat dikarenakan belum menemukan waktu yang tepat. "Kami menunggu jadwal camat. Hingga saat ini camatnya masih ada kegiatan. Kami berharap secepatnya karena PPDB perlu rencana yang matang," tutupnya.***

Daging di Atas HET, Disperindag Surati Kementerian

BATAM KOTA (BP) - Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Batam telah menyurati Kementerian Perdagangan (Kemendag) terkait harga daging sapi beku di atas harga eceran tertinggi (HET) di Batam. Selain itu, Disperindag juga berkoordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan dan distributor terkait stok dan kenaikan harga daging saat ini.

"Distributor daging di Jakarta sudah jual Rp 78 ribu per kilogram. Nah, mau dijual berapa di Batam? Sedangkan HET sendiri Rp 80 ribu per kilogram," kata Kepala Bidang (Kabid) Perdagangan Disperindag Kota Batam Adisthy, Selasa (24/4).

Menurut dia, dari pihak kementerian sendiri berjanji akan langsung turun ke Batam jika memang perlu dilakukan perubahan HET. "Kalau distributor saja sudah tinggi. Bagaimana jual ke pedagang, sementara harga distributor dan pedagang juga tidak terlalu jauh berbeda," sebutnya.

Terkait harga daging sapi sendiri, ia mengaku sudah turun ke beberapa pasar. Hasilnya, dijual di atas HET, yakni

Baca **DAGING**...Hal 13

daging sapi beku dijual di atas HET.

Daging di Atas HET, Disperindag Surati...

Sambungan dari hal 9

berkisar Rp 81 ribu-Rp 82 ribu per kilogram untuk daging sapi beku. Bila dilihat dari harga distributor saat ini, ia mengaku masih dalam kategori wajar, karena belum menyentuh di angka Rp 87 ribu per kilogram.

"Kenaikan ini dikarenakan pembatasan kuota, makanya stok agak berkurang. Tapi dari distributornya memang dijual tidak di atas HET," sebut dia. Sementara harga daging ayam juga mengalami kenaikan antara Rp 38 ribu sampai Rp 39 ribu per kilogram. "Untuk daging ayam kita segera cari penyebabnya," tegas Adisthy.

DPRD Kota Batam meminta Disperindag Kota Batam untuk bisa mengendalikan harga jelang Lebaran. Dimana setiap tahun, harga sembako naik di pasaran dan memicu terjadinya inflasi. "Ini menjadi tugas dari Disperindag. Janganlah setiap menjelang hari besar selalu naik harga. Ini menjadi tugas kita bersama," kata ketua Komisi II DPRD Kota Batam Edward Brando, kemarin.

Ia mengatakan dalam waktu dekat akan memanggil Disperindag untuk meminta keterangan mengenai harga-harga yang sudah mulai naik di pasaran. Sekaligus meminta pernyataan mengenai pasokan sembako menjelang Lebaran.

Sementara itu, anggota Komisi II DPRD Kota Batam Mulia Rindo Purba juga meminta Pemerintah Kota (Pemko) Batam untuk bisa menjamin pasokan tetap ada, sehingga tidak ada alasan pedagang untuk menaikkan harga.

"Selama ini pasokan menjadi alasan untuk menaikkan harga barang. Kalau stok kurang, Pemko harus cari jalan keluarnya," katanya.

Menurutnya, komoditas daging selalu menjadi masalah menjelang lebaran. Ia berharap Disperindag bisa terus melakukan pengawasan terhadap distributor. Sehingga dipastikan tidak ada distributor yang sengaja menimbun barang yang berimbas kepada kenaikan harga.

Terpisah, Kepala Disperindag Kota Batam Zarefriadi menyatakan pihaknya terus melakukan pengawasan harga. Ia juga menyebutkan hingga saat ini pasokan masih aman. "Ya, kita terus berupaya untuk menjaga stok ini aman. Dan kita berharap tidak ada pedagang yang menjual harga di atas ketentuan yang berlaku," ujarnya.

Petani Batam Jamin stok

Kelompok Tani Batam mengaku cukup siap untuk menjamin kebutuhan sayur dan komoditas pangan lainnya di Batam. Ini disampaikan sejumlah kelompok tani saat mengikuti bazar dan pameran hasil tani di halaman Lembaga Pemasyarakat (Lapas) Kelas IIA Batam di Tembesi, Sagulung, kemarin.

Sanan, pengurus kelompok Tani Permai dari Pulau Galang menuturkan, setiap anggota kelompok tani Permai mampu menghasilkan 10-15 ton cabai dan sayur dalam sekali panen untuk ukuran lahan pertanian seluas satu hektare. Hasil panen yang cukup bagus ini diakui mencukupi untuk memenuhi kebutuhan di Batam. Sebab dalam kelompok tersebut ada 21 anggota.

"Setiap anggota rata-rata kebunnya di atas setengah hektare. Kalau ditotalkan semua (hasil panen) sangat banyak," sebut Sanan.

Memang dalam prakteknya, lanjut Sanan, tentu ada hambatan. Tidak sedikit tanaman mereka gagal panen karena berbagai faktor. Namun jika usaha mereka benar-benar didukung pemerintah tentu Batam tak perlu mendatangkan sayur dan komoditas pangan lainnya dari luar. "Di Batam ini ada seratusan kelompok tani. Kalau benar-benar dikelola dengan baik tentu bisa menjamin stok sayur dan cabai di Batam," ungkapnya.

Senada disampaikan Imron, petani lainnya di Tembesi. Menurut dia potensi Batam di bagian pertanian khususnya komoditas sayur cukup baik. Namun demikian, petani belum bisa bekerja maksimal karena dukungan pemerintah masih minim khususnya persoalan lahan. "Lahan masih sistem pinjam semua. Jadi agak susah mau fokus (ke pertanian)," ujarnya.

Dengan adanya bazar dan pameran tersebut para petani berharap agar diberi kemudahan dan dukungan dari pemerintah daerah, sehingga usaha mereka berjalan dengan baik demi meningkatkan perekonomian di Batam.

Omset Pedagang Turun

Dampak masih tingginya harga daging ayam potong dan daging sapi beku ternyata tak hanya dirasakan ibu rumah tangga. Para pedagang juga mengeluhkan omset penjualan mereka turun dari biasanya karena tingginya harga.

Mansur, pedagang daging di Pasar Tos 3000 misalnya. Dia mengaku omset penjualannya turun. Sebelum kenaikan, ia bisa menjual daging sapi beku lebih dari 50-70 kilogram sehari. Namun saat ini, penjualnya kadang hanya 30 kg per harinya. "Pembeli juga sepi. Ada yang beli cuma jumlahnya sedikit-dikit *aja*. Jarang yang beli perkilo," sebutnya.

Menurut dia, jika pun ada yang membeli jumlah banyak, itu karena langganan punya warung makan. Sedangkan ibu rumah tangga biasa, rata-rata membeli kurang dari setengah kilogram. "Harga masih Rp 88 ribu per kilogram. Itu untuk daging padat, kalau daging berlemak harganya agak murah, Rp 85 ribu per kilo," kata Mansur.

Hal yang sama juga berlaku untuk daging ayam. Dimana, harga per kg Rp 35 ribu. Omset penjualannya ikut turun. Biasanya sehari menghabiskan 100 kilogram, kini paling banyak hanya 70 kg. "Nah, mereka (pembeli) minta potong ukuran agak kecil. Biasanya potong 8 untuk per ekornya, sekarang kadang minta potong sampai 10," jelas Mansur lagi.

Kondisi yang sama juga dikatakan Abi, penjual daging lainnya. Menurutnya pembeli berkurang lantaran harga daging sapi tinggi. Keberadaan daging kerbau, ternyata tak berpengaruh juga terhadap harga daging sapi beku. "Kalau daging kerbau saya tak ambil. Jarang yang mau beli, meski sudah ditawari. Jadi saya tetap jual daging sapi," imbuhnya.

Dikatakan Abi, waktu harga daging sapi beku belum naik ia bisa menjual lebih dari 50 kilogram per hari. Namun saat ini, penjualnya menurun. "Tak sampai 50 kilo, bisa 30 atau 40 kilo sehari. Tergantung hari juga sih. Biasanya Jumat sampai Minggu agak ramai," ujar Abi.

Ulah Pedagang Pasar

Mahalnya harga ayam potong di Batam yang mencapai Rp 35 ribu sampai Rp 37 ribu per kg jelang Ramadan di beberapa pasar dibantah oleh distributor utama atau pemasok ayam potong di Batam, PT Dewi Kartika Inti.

Menurut Dewi selaku pemilik PT Dewi Kartika Inti, harga ayam potong yang dijual di beberapa pasar tradisional yang tersebar se-Batam sudah tak wajar di angka Rp 37 ribu per kg.

"Harga ayam setinggi itu, saya yakin ini ulah beberapa pedagang ayam potong di pasar yang memanfaatkan momen jelang bulan Ramadan nanti. Karena dari saya selaku distributor saja, harga ayam itu saya jual ke pedagang pasar mulai Rp 29 ribu hingga Rp 29 500 per kilogram. Itu sudah harga tertingginya. Ini kok pedagang jual ke masyarakat hingga Rp 37 ribu, ambil untungnya kelewatan itu," ujar Dewi, kemarin.

Untuk pasokan ayam potong sendiri di Batam ini, lanjut Dewi, mayoritas masih mengandalkan pasokan dari Jawa, yakni Jakarta. Terkadang ada juga dipasok dari Medan. Idealnya, kata Dewi, saat ini pedagang ayam potong di pasar itu menjual ayam potong mulai Rp 32 ribu sampai Rp 34 ribu per kilogram.

"Biasanya pedagang di pasar itu kan rata-rata *ngambil* untungnya antara Rp 2 ribu hingga Rp 4 ribu per kilogram ayam potong. Kalau mereka ambil untungnya sudah lebih dari Rp 4 ribu, itu sudah tak wajar lagi, itu sudah monopoli harga. Saya justru baru dengar kalau harga ayam potong di pasar-pasar saat ini menggila, padahal dari kami masih di bawah Rp 30 ribu loh per kilogramnya," terang Dewi.

Ia mengakui, saat ini permintaan tambahan pasokan dari beberapa pedagang meningkat akan ayam potong. Dalam sehari biasanya hanya 2,5 ton sampai 3 ton saja ia jual, saat ini mencapai 4 ton dalam seharinya.

"Kalau sudah kondisinya seperti itu, kami dari distributor berharap kepada pemerintah Batam untuk lebih sering melakukan operasi pasar mengontrol harga ini. Jangan sampai pedagang seenaknya menaikkan harga ayam potong ke masyarakat dengan harga yang sudah tak wajar. Kami dari distributor juga siap kalaupun nanti dimintai bantu terkait operasi pasar," terangnya.

Saat ini di Batam, diakui Dewi, memang sudah ada beberapa peternak ayam, tepatnya di kawasan Barelang. Namun, pasokannya untuk kebutuhan Batam jauh dari mencukupi.

Hal yang sama juga dikatakan oleh distributor ayam potong lainnya, PT Batam Frozen Food William. Ia juga mengaku kaget kalau di beberapa pasar, pedagang menjual ayam potong hingga Rp 35 ribu sampai Rp 37 ribu per kilogram.

"Itu harga sudah dimainkan sendiri oleh pedagang pasar. Nggak ada itu harga ayam potong setinggi itu sekarang ini di Batam. Sebab dari kami saja perkilogram ayam potong saja kami jual hanya di bawah Rp 30 ribu kok. Ini yang bikin nama kami distributor atau pemasok ayam potong jadi buruk di mata masyarakat, padahal para pedagang di pasar sendiri yang menaikkan harga setinggi itu," terang William.

William menduga, pedagang nekat menaikkan harga daging ayam hingga Rp 37 ribu per kilogram karena memanfaatkan momen jelang Ramadan yang biasanya permintaan ayam potong tinggi. **(eja/ian/gas/rng/she/mta)**

11 Ribu e-KTP Didistribusikan

SEKUPANG (BP) - Penantian panjang warga Sekupang untuk memiliki fisik Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) tuntas sudah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Batam akhinya berhasil menyelesaikan pencetakan e-KTP tersebut, pekan ini.

"Besok (hari ini, *red*) sudah selesai dan langsung kami serahkan ke kecamatan," kata Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk dan Informasi Disdukcapil Batam, Teddy Nuh, Selasa (24/4).

Ia menyebutkan, warga Sekupang yang telah mengajukan pencetakan e-KTP tahun lalu sudah bisa mengambil di kecamatan. "Kamis mungkin sudah boleh diambil," katanya.

Sebanyak 11 ribu pengajuan e-KTP milik warga Sekupang ini berhasil diselesaikan kurang lebih dua pekan. Setelah penyerahan tersebut, alat pencetakan akan dikembalikan ke masing-masing kecamatan.

"Ada sembilan kecamatan yang akan mulai mencetak sendiri e-KTP warga mereka kecuali di *hinterland* (pesisir, red) karena sedikit, jadi dipusatkan di Disduk saja," jelasnya.

Ia menegaskan, ke depan tidak ada lagi permasalahan pencetakan e-KTP yang lambat karena sudah diserahkan ke tingkat kecamatan. "Yang pasti syaratnya harus lengkap. Paling lambat 14 hari kerja sudah bisa diambil," imbuhnya.

Camat Sekupang Muhammad Arman mengatakan sudah menyiapkan konter khusus untuk pengambilan 11 ribu e-KTP yang sudah selesai dicetak. "Sore ini (kemarin) kami sudah mulai persiapan untuk pendistribusian e-KTP milik warga," kata dia.

Warga yang ingin mengambil e-KTP harus membawa resi pengambilan sebagai bukti telah merekam di Kecamatan Sekupang.

"Warga yang sudah merekam kami minta untuk datang ke kecamatan dan mengambil e-KTP miliknya," lanjutnya. **(yui)**

Penertiban Kios Pasar Induk Ditunda

BATUAMPAR (BP) - Tim terpadu Kota Batam menunda penertiban kios di Pasar Induk, Jodoh. Sebab, hingga saat ini lahan relokasi sementara untuk para pedagang belum siap.

Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Batam Imam Tohari mengatakan, beberapa waktu lalu, pihaknya sudah melayangkan surat kepada para pedagang. Isi surat itu meminta agar para pedagang segera mengosongkan kios yang ada di dalam dan pinggir jalan Pasar Induk.

"Surat kemarin hanya untuk meminta pedagang mengosongkan, bukan jadwal penertiban," terang Imam.

Menurut dia, penertibaan kios belum bisa dilakukan karena lahan untuk relokasi sementara di lahan kosong tak jauh dari pasar induk, belum beres.

"Rencananya ada lahan di depan DC Mall. Tapi masalahnya, kami belum dapat persetujuan pinjam pakai lahan tersebut. Pemilik lahan masih di luar kota," jelas Imam.

Dikatakannya, jika izin peminjaman lahan sudah didapat, maka pihaknya akan segera melayangkan surat peringatan kepada para pedagang.

"Prosedur tetap kami lakukan sebelum penertiban kios pedagang," tegas Imam.

Di sisi lain, Imam mengaku saat ini pihaknya tengah fokus membersihkan bekas penertiban di kawasan Jodoh atau tepatnya sederetan dengan Kantor BCA. Sementara, untuk seberang kantor BCA itu masih menunggu.

"Kalau di sana sudah siap, baru yang seberang BCA dibersihkan," imbuh Imam. **(she)**